

**AGAMA DAN PEMBANGUNAN:
SUATU ORIENTASI AWAL FILSAFAT
KEBUDAYAAN**

Oleh: Budi Setiawan *)

I

Banyak pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan kedudukan dan peran agama dalam konteks pembangunan nasional suatu negara, terutama pembangunan nasional di negara-negara dunia ketiga. Beberapa pertanyaan yang mendasar ialah: Apakah agama merupakan akses keberhasilan suatu upaya pembangunan atau bahkan sebaliknya? Bagaimana dampak keberhasilan suatu pembangunan yang notabene pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebagai arus utamanya (profane) terhadap kehidupan keagamaan (sacre) para pemeluknya?

Sebagaimana issue yang dikemukakan oleh Soedjatmoko dalam kasus pembangunan ekonomi di Asia (termasuk di Indonesia) bahwa sistim organisasi sosial kebanyakan masyarakat Asia secara tradisional dibentuk oleh agama. Bahasa yang paling berarti dikalangan sebagian besar masyarakat Asia masih merupakan bahasa agama (Soedjatmoko, 1984:191). Oleh karena itu pembangunan memberikan tantangan terhadap agama untuk menggiatkan dorongan-dorongan yang lebih khusus dan lebih mendasar, demi meningkatkan pembangunan ekonomi. Dorongan di alam masyarakat kita ini (Indonesia) jelas tertanam dalam acuan budaya agama. Persoalan sebagian memang merupakan salah satu dari manipulasi simbol dan kreasi simbol yang lebih efektif. Dan lebih banyak lagi yang dapat dilakukan yang berharga dalam masalah ini (Soedjatmoko, 1965:6).

Dari issue-isue yang di kemukakan di atas dapat dikatakan bahwa dalam kasus pembangunan bisa terjadi agama telah terperangkap dalam kesadaran ideologis yang hanya berfungsi pembenaran yang cenderung membuka wajah para realisme secara positif sebagai bagian cetak-biru pembangunan. Jadi ada ide pembangunan atau ide modernisasi yang kemudian menjadi cetak-biru, semacam ideologi yang mendatangkan suatu kesadaran tertentu dan kemudian agama juga mendatangkan kesadaran tertentu pula yang mirip cetak-biru. Dalam hal ini agama dan pembangunan jatuh dalam

*) Staf pengajar Fisis Universitas Airlangga Surabaya

kesadaran struktural yang sama. Didalam situasi yang semacam ini seringkali pembangunan juga tidak boleh dikritik karena merupakan suatu cetak-biru ideologi yang harus diyakini dan diperjuangkan. Agama juga jatuh didalam kesadaran struktural seperti itu yang juga boleh dikritik. Akibatnya dua kesadaran ini kalau tidak saling beraliansi, maka bisa saling bertabrakan. Tidak jarang terjadi tabrakan kepentingan antara kesadaran agama yang struktural dan kesadaran pembangunan yang juga struktural. Sering kali muncul suatu pola kepentingan, karena adanya dua kesadaran yang muncul baik dari agama maupun dari pembangunan (Abdurrahman, 1989:15). Dengan kalimat lain dapat dikatakan bahwa agama dan pembangunan dapat terperangkap kepada kesadaran ideologis tertentu yang masing-masing mengembangkan strukturnya secara tersendiri, hal ini dapat dipahami karena baik agama maupun pembangunan pada kondisi dan situasi tertentu dapat diperlakukan dalam rangka kepentingan-kepentingan (interest theory) dan dapat pula sebagai ketegangan-ketegangan (strain theory) tertentu oleh pemeluk suatu agama dan atau subyek pendukung suatu pembangunan itu sendiri, ini terlihat dari determinan-determinan sosial dari keberadaan ideologinya (Geertz, 1973:201).

II

Agama secara mendasar dan umum, dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam definisi tersebut sebenarnya agama dilihat sebagai teks atau doktrin; sehingga keterlibatan manusia sebagai pendukung atau penganut agama tidak tampak tercakup didalamnya, oleh karena itu dengan memperhatikan masalah tersebut maka agama selanjutnya didefinisikan sebagai suatu sistim keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci, agama sebagai sistim keyakinan dapat menjadi bagian dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya (Suparlan, 1986:V-VII).

Dengan demikian agama berfungsi membakukan nilai-nilai budaya dan pranata-pranata yang dimiliki oleh masyarakat yang

bersangkutan (tradisi bersanding syarak, syarak bersendikan kitabullah), maka disini suatu ajaran agama dapat berpengaruh kuat terhadap sistem-sistem nilai dari kebudayaan, yang mewujudkan sebagai sistem-sistem simbol suci yang bermuatan makna dan bersumberkan dari ajaran-ajaran agama sebagai kerangka acuannya.

Dalam kenyataan demikian agama sebagai sistem kebudayaan, adalah: (1) suatu sistem simbol yang bertindak untuk ...; (2) memantapkan, meresapkan perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh dan bertahan lama dalam diri manusia dengan ...; (3) memformulasikan konsepsi-konsepsi keteraturan/tata tertib suatu kehidupan dan...; (4) ...menyelimuti konsepsi-konsepsi tersebut dengan aurora tertentu secara nyata sehingga ...; (5) .. perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi tersebut tampak secara unik bersifat nyata ada (Geertz, 1973:89-90).

Dari sebab itu agama merupakan salah satu unsur/isi obyektif dari kebudayaan (Koentjaraningrat, 1974:12 ; van Peursen, 1976:11 ; Bakker, 1984:36), dan secara lebih khusus bersifat tersendiri pula yang membedakan dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya karena kedudukan dan peranannya sebagai cetak-biru kehidupan maka agama merupakan unsur kebudayaan yang relatif lebih sukar berubah-ubah seiring dengan dinamika perubahan masyarakat dan kebudayaan. Yang sudah pasti yang tidak akan pernah berubah dari agama, adalah teks sucinya, sebagai hal dibedakan dari tataran keberagamaan lainnya sebagai sistem kebudayaan. Dengan kata lain kebudayaan bukanlah kata benda akan tetapi lebih sebagai kata kerja dan karena itu hendaknya dipahami sebagai suatu yang tidak mutlak, ia terus-menerus bergerak berubah (dinamis) untuk memperbaharui sendiri pola dirinya setiap kali ada beberapa unsur yang mendukungnya berada dalam kondisi merapuh dan tampak siap untuk meruyak (van Peursen, 1976:11; Kayam, 1987:309).

Sementara itu pembangunan sebagai suatu proses perubahan adalah suatu proses perubahan yang disengajakan secara politik.

Dikatakan demikian karena sepanjang proses ini selalu terjadi kontes-kontes antara berbagai kekuatan dan kekuasaan (power) untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan atau ketetapan-ketetapan normatif apa yang harus diputuskan untuk merekayasa --atau setidaknya-- untuk mempengaruhi--arah tujuan dan jalannya perubahan itu. Bermakna politik, dan muncul dalam sejarah sebagai fenomena belahan akhir abad 20 di dunia ketiga sungguh berbeda dengan proses-proses perubahan serupa yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia pada masa yang lalu di Eropa Barat yang lebih mengisyaratkan sifatnya

sebagai proses yang diprakarsai oleh motif-motif ekonomi dan yang kemudian juga disusul proses-proses sosial yang adatif. Tetapi patutlah dicatat secara khusus bahwa mengedepannya pembangunan sebagai suatu proses politik di negara-negara yang sedang berkembang pada belahan akhir abad 20 ini sering terjadi berseiring dengan mengaburnya batasan-batasan klasik---yang dikonsepsikan oleh dan dalam perkembangan Dunia Barat---mengenai peran negara, pasar, dan masyarakat sipil (Wignosoebroto, 1992:1). Sebagaimana konsep pembangunan nasional Indonesia yang berdimensi politik dan sekaligus ekonomi sebagai dua muka dari mata uang yang sama disatu pihak serta suatu afirmasi akan pentingnya (...?) dimensi lain-lainnya dalam rangka keberhasilan konsep pembangunan nasional tersebut.

Ditinjau dari sudut dialektika perkembangan masyarakat, pembangunan adalah sekaligus metodologi dan prasarana pengembangan struktur dan kebudayaan masyarakat (Kayam, 1987: 310). Karena itu memahami tentang konsep pembangunan sebagai konsep yang berdiri sendiri sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan konsep kebudayaan dan struktur masyarakat.

Oleh karena, agama sebagai sistem kebudayaan serta pembangunan sebagai metodologi dan prasarana pengembangan struktur dan kebudayaan masyarakat berada dalam suatu arena realitas yang sama, maka dimungkinkan terjadinya konflik dan integrasi dikarenakan akses terhadap dinamika perubahan mempunyai batas-batas wilayah dan tawar-menawar secara tersendiri dan tertentu berdasarkan otonominya masing-masing sehingga yang sakral tidak didesakralisasikan (sekuralisasi) ataupun sebaliknya yang memang sekuler disakralisasikan. Dilihat dari perspektif demikian, sebenarnya suatu situasi dialektis dimungkinkan dapat dilakukan pengaturan (adjustable) secara kreatif dan inovatif dan hal ini menurut persyaratan akan adanya nuansa kebebasan dan keterbukaan.

Dalam hal ini keberagaman yang hidup dalam masyarakat pada tataran amalannya (bukan teks suci dan sistem keyakinannya) perlu diwujudkan lebih baik lagi, karena hanya amalan agama yang bisa dilihat dalam realita empirik keberagaman dan memiliki relevansi yang langsung pada inti permasalahan pembangunan, sehingga dapat dilihat seberapa jauh yang dapat dilakukan oleh agama dalam peran sertanya dengan proses transformasi sosial (Wirosardjono, 1989: 8).

Amalan keberagaman merupakan kinerja dari tumbuhnya kepekaan sosial yang dapat dihasilkan karena adanya motivasi dan dorongan spiritualitas yang dapat menumbuhkan refleksi dan kontemplasi dalam kehidupan beragama lebih dari sekedar ritus-ritus

keagamaan yang diyakininya dan dilakukannya untuk mempertahankan dan menumbuhkembangkan keberadaan agamanya. Refleksi dan kontemplasi yang dilakukan justru harus terkait dengan berbagai masalah dilematik dalam hubungan antara individu dan negara, antara iman dan pengetahuan, antara moralitas dan sikap hidup pragmatik. Refleksi keagamaan bahkan harus menyelesaikan tugas berat untuk mengatur hubungan antara nilai-nilai normatik dan perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula, pergaulan antara pihak-pihak yang berlainan keyakinan dan berbeda keimanan masih harus menemukan bentuknya yang mantap, yang terus terang saja hingga saat ini baru ditangani secara semu belaka. Kalau ada kesadaran reflektif dan kontemplatif untuk menumbuhkan sisi keberagaman yang demikian, maka baru terbatas pada para pemikir dan pemimpin agama ditingkat atas, belum turun tingkat yang langsung memimpin kehidupan umat bergama dalam kegiatan sehari-hari dilapangan (Wahid, 1989: 5-7).

Pada sisi lain, haruslah disadari sepenuhnya bahwa pembangunan sebagai metodologi dan prasarana pengembangan struktur dan kebudayaan masyarakat, hanyalah sebagai paradigma kebudayaan dalam upayanya secara sadar dan sengaja untuk meningkatkan mutu dinamika pola kebudayaan dan oleh karena itu haruslah tetap menempatkan manusia (pribadi- sosial) sebagai subyek pembangunan itu sendiri, agar dengan demikian pembangunan berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan pada awalnya, yaitu hanya sebagai metodologi dan prasarana pengembangan struktur dan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu klaim atas pembangunan yang berlangsung dari dan oleh siapa itu dilakukan, hanya akan menjauhkan dan bahkan merusak-rusakkan pola kebudayaan yang ada dan dimilikinya sendiri apalagi pola kebudayaan yang diharapkan sebagai tujuan dinamika kebudayaan yang dinyatakan pertumbuhan dan perubahan, sebagai esensi kebudayaan itu sendiri (eksistensial game).

III

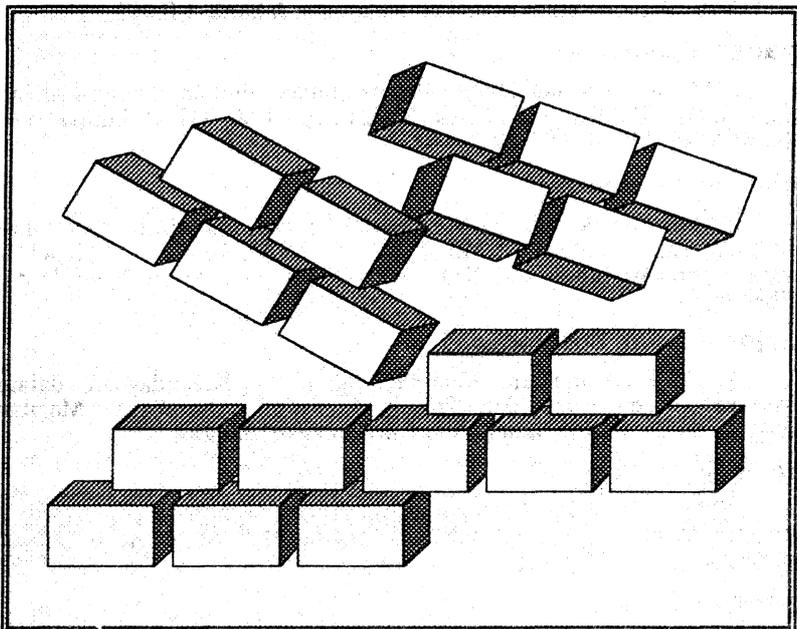
Disini relevansi filsafat kebudayaan menempatkan dirinya pada kedudukan dan perannya yang strategis, sebagai exercise kebudayaan yang merupakan ketegangan antara imanensi dan transendensi sebagai ciri khas dari totalitas kehidupan manusia yang hidup dan bergelut dengan proses-proses kehidupan (imanensi), tetapi juga selalu mengatasi dan memberikan penilaian serta mengubah arus alam raya

ini (transendensi) menurut cipta dan citra rasanya sebagai kalifatullah dalam kehidupan dijagat raya ini (Van Peursen, 1976: 15-17).

Kajian-kajian filsafat kebudayaan dan filsafat manusia dapat menghasilkan kesuburan intelektual dan kesadaran kritis masyarakat, yang pada gilirannya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang mampu memaksa dan akhirnya memandu dinamika kebudayaan serta berlaku sebagai kekuatan integratif dalam proses pembangunan nasional Indonesia.

Kesadaran kritis ini secara normatif senantiasa akan menjadi jiwa dan semangat kehidupan beragama dan berkebudayaan secara bersama-sama dalam suatu arena, yaitu kenyataan hidup berbangsa dan bernegara; Indonesia dengan pembangunan nasionalnya.

Selebihnya, adalah menjadi tugas teknokrat dan birokrat pemerintah serta seluruh masyarakat sebagai pelaku dan sekaligus pendukung pembangunan untuk bersama-sama membicarakan secara teknis detail-detail perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga merupakan tugas yang tidak kalah berat dan pentingnya, dan oleh sebab itu diperlukan kajian, dan keahlian tersendiri secara konseptual teoritik maupun praktek pelaksanaannya, sehingga deferensiasi tugas dan peranan suatu masyarakat yang semakin kompleks permasalahannya akan menjadi tuntutan dan konsekwensi logis yang menandai dinamika masyarakat dan kebudayaan yang seringkali disebut sebagai :pembangunan.



KEPUSTAKAAN

Abdurrahman, Moeslim

1989, *Keberagamaan Didalam Pembangunan, dalam Moralitas Pembangunan : Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, diedit oleh M. Masyhur Amin, LKPSM-NU-DIY.

Bakker, J.W.M.

1984, *Filsafat Kebudayaan; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia.

Geertz, Clifford

1987, *The Interpretation of Cultures*, New York, Basic Book Inc.

Kayam, Umar

1987, *Kebudayaan dan Pembangunan, dalam Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, disunting oleh : Nat J. Colleta dan Umar Kayam, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

Koentjaraningrat

1974, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia.

Soedjatmoko

1965, *Cultural Motivation to Progress: The Exterior and the Interior Views*, dalam *Religion and Progress in Modern Asia*, diedit oleh Robert N. Bellah, New York: The Press.

1984, *Agama dan Proses Pembangunan di Asia*, Kertas kerja dalam Asian Economical Confrence for Development di Tokyo, Juli 1970 dimuat dibawah judul buku: *Etika Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Suparlan, Parsudi

1986, *Kebudayaan Dalam Pembangunan*, dimuat dalam majalah Dialog, Jakarta: Balitbang Depag-RI, No. 21 Sept. 1986 TH.XI, kutipan dari media IKA No. 11 TH XIV 1986.

Wahid, Abdurrahman

1989, *Aspek Religius Agama-Agama di Indonesia dan Pembangunan, dalam Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, diedit oleh M. Masyhur Amin, Yogyakarta: LKPSM-NU-DIY

Wignjosoebroto, Soetandyo

1992, *Pembangunan, Ketergantungan dan Keberdayaan, dalam Masyarakat, Kebudayaan dan Politik No.8-Th.V*, Surabaya: Majalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Wirosardjono, Soetjipto

1989 *Agama dan Pembangunan, dalam Moralitas Pembangunan: Prospektif Agama-Agama di Indonesia*, diedit oleh M. Masyhur Amin, Yogyakarta: LKPSM-NU-DIY.

Peursen, C.A. van,

1976, *Strategi Kebudayaan, di Indonesiakan oleh Dick Hartoko*, Yogyakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia.